SKRIPSI

ANALISA KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG SIDIMPUAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ehonomi Srata Satu (S-l) pada
Fakultas Ehonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Pekanbaru

Oleh

IRWANSYAH PANE
NIM.155111187

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN S-1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

ANALISA KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG SIDIMPUAN

Oleh

IRWANSYAH PANE
NIM.155111187

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang Sidempuan adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menegetahui seberapa besar kontribusi retibusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sidempuan selama tahun 2011-2020 dan Untuk mengetahui perkembangan kontribusi retribusi pasar di daerah Kota Padang Sidempuan selama tahun 2011-2020. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian in adalah Data Sekunder yang dimana dengan pengumpulan data dari dokumen-dokumen atau bukti tertulis berupa laporan data mengenai Retribusi Pasar, Retribusi Daerah dan PAD sempuluh tahun terakhir. Dan sumber data pada penelitian ini berasal dari DISPENDA Kota Padang Sidempuan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan metode Analisis Kontribusi dan Analisis Least Square. Data diolah dengan menggunakan perhitungan manual. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah kota padang sidempuan cenderung mengalami penurunan; 2) Perkembangan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di kota Padang Sidempuan pada tahun 2011-2020 menurun.

***Kata Kunci**: PAD, retribusi pasar, kontribusi.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF MARKET RETRIBUTION AND CONTRIBUTION TO CITY REGIONAL INCOME OF PADANG SIDEMPUAN

By

IRWANSYAH PANE
NIM.155111187

This research was carried out in the city of Padang Sidempuan. The purpose of this research is to find out how big the contribution of market fees to Padang Sidempuan City's Original Revenue during 2011-2020 and to find out the development of the contribution of market fees in the Padang Sidempuan City area during 2011-2020. The type of data used in this research is secondary data, which collects data from documents or written evidence in the form of data reports on market levies, regional levies and PAD for the last ten years. And the source of data in this study came from the DISPENDA of Padang Sidempuan City and the Central Statistics Agency (BPS). This research uses Contribution Analysis and Least Square Analysis method. The data is processed using manual calculations. From the results of this study, it is known that: 1) The contribution of market retribution to the local revenue of Padang Sidempuan City tends to decrease; 2) The development of the contribution of market levies to PAD in the city of Padang Sidempuan in 2011-2020 decreased

Keywords: *PAD, market retribution, contribution.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisa Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sidimpuan".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Selama dalam dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala ataupun masalah yang dihadapi penulis dan penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan maupun isinya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya berkat bimbingan, pengarahan serta motivasi yang telah diberikan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini disamping bantuan lain dari berbagai pihak yang juga sangat bermakna. Oleh karena itu pada kepatan ini tidak ada kata yang lebih indah dan lebih banyak kecuali ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam dari penulis kepada:

1. Bapak
2. Bapak
3. Bapak
4. Bapak
5. Bapak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama sebagai bahan masukan dalam berbagai pihak dan bagi perkembangan dunia ekonomi khsusnya bidang ekonomi pembangunan, Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis,

IRWANSYAH PANE
NIM.155111187

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Mamfaat Penelitian 9
1.5 Sistematika Penulisan 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS **11**
2.1 Landasan Teori 11
2.1.1 Teori Ekonomi Klasik 11
2.1.2 Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah 11
2.1.3 Pendapatan Daerah 15
2.1.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 15
2.1.5 Retribusi Daerah 16
2.1.6 Jenis –jenis Retribusi Daerah 18
2.1.7 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah 21
2.1.8 Defenisi Pendapatan 22
2.1.9 Defenisi Pasar 22
2.1.10 Retribusi Pasar 23
2.1.11 Penelitian Terdahulu 24
2.2 Hipotesis 26
BAB III METODE PENELITIAN **28**
3.1 Jenis Penelitian 28
3.2 Lokasi Peneltian 28
3.3 Jenis dan Sumber Data 28
3.4 Metode Pengumpulan Data 29

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.5 Teknik Analisis Data 29
3.5.1 Anlisis Kontribusi 29
3.5.2 Analisis *Least Square* 30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 31
4.1.1 Letak dan Geografis Kota Padang Sidempuan 31
4.1.2 Keadaan Penduduk Kota Padang Sidempuan 33
4.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Padang Sidempuan 36
4.2 Perkembangan Retribusi Pendapatan Asli Daerah Padang Sidempuan 48
4.2.1 Perkembangan Retribusi Pasar di Kota Padang Sidempuan 50
4.2.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Padang Sidempuan 51
4.3 Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Sidempuan 52
4.4 Perkembangan Kontribusi Retribusi Pasar di Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Sampai 2019 57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 61
5.1 Kesimpulan 61
5.2 Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 63

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi PAD Kota Padang Sidempuan 4
Tabel 1.2 Data Target dan Realisasi Retribusi 6
Tabel 1.3 Data dan Target Realisasi Retribusi Pasar 7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 24
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang Sidempuan Periode Tahun 2014-2019 40
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Retribusi Pasar Pemerintah Kota Padang Sidempuan Periode Tahun 2014-2019 41
Tabel 4.3 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Tahun 2014-2019 45

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 39
Gambar 4.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sidempuan 41
Gambar 4.3 Retribusi Pasar Kota Padang Sidempuan 42
Gambar 4.4 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD..... 46

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Sidempuan
Lampiran 2. Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.Sumber penerimaan ini digunakan untuk membiayai segala kebutuhan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pasar dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang paling besar bagi daerah.Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia.

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menggali sedalam-dalamnya sekaligus seluas-luasnya potensi daerah yang dimilikinya yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhannya khususnya untuk membiayai pembangunan daerahnya agar tidak hanya tergantung subsidi dari pemerintah pusat, yang selama ini masih menjadi sumber utama penerimaan daerah.

Bila dilihat dari kontribusinya bagi Retribusi Daerah, Retribusi Pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota padang Sidimpun. Sehingga diharapkan dari retribusi pasar tersebut menjadikan penerimaan retribusi daerah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan suatu landasan bagi pengembangan ekonomi daerah.Pengembanganekonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.Undang-undang No. 32 tahun 2004 merupakan bentuk penyelarasan dari undang-undang No. 22 tahun 1999 sebagai akibat adanya perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan pada masa sekarang.

Proses desentralisasi pemerintahaan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah adalah prosesdevolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota atau proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal1 ayat 5 menyatakan bahwahak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini diharapkan menjadi solusi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

agar daerah menjadi mandiri dalam membiayai rumah tangganya sendiri.Kemandirian suatu pemerintah daerah diukur melalui pendapatan asli daerah.Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah,retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah.Semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kaitannya dalam pemberian otonomi kepada daerah dalammerencanakan, menggali, mengelola dan menggunakaan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat.2 Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal.Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekat yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor dari luar.Meskipun dimaklumi bahwa sebagian besar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan PAD-nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Meskipun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi (kuat), namun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diharapkan kepada setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan ekstensif di samping peningkatan pengelolaan sumber daya alam di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.

Pemerintah Kota Padang Sidimpuan dalam usahanya untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumberpendapatan asli daeranya sesuai potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan diKota Padang Sidimpuan, berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 1.1 : Data Target dan Realisasi PAD Kota Padang Sidimpuan 2011-2020 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2011	47.984.229.382	40.291.003.229
2012	59.928.383.112	50.211.235.389
2013	77.980.235.334	69.272.483.593
2014	46.786.292.731	49.392.093.500
2015	48.576.010.706	58.725.449.619
2016	78.587.530.960	67.730.738.637
2017	84.503.351.787	78.147.944.283
2018	120.211.679.947	109.640.419.280
2019	91.150.238.478	75.063.575.092
2020	97.944.798.103	87.432.283.185

Sumber : DISPENDA Kota Padang Sidimpuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Tabel 1 di bawah dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Sidimpuan berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sebesar Rp. 40.291.003.229, pada tahun 2012 naik sebesar Rp. 50.211.235.389, di tahun 2013 naik sebesar Rp. 69.272.483.593, di tahun 2014 terjadi penurunan sebesar Rp. 49.392.093.500, pada tahun 2015 naik sebesar Rp. 58.725.449.619, pada tahun 2016 naik sebesar Rp. 67.730.738.637, pada tahun 2017 sebesar Rp. 78.147.994.283, pada tahun 2018 sebesar Rp. 109.640.419.280, pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp. 75.063.575.092, dan pada tahun 2020 naik sebesar Rp. 87.432.283.185 , dari data yang terlihat bahwa PAD di kota Padang Sidempuan tidak ada satu pun yang memenuhi target, data tahun 2011 sampai 2020 realisasi PAD Kota Padang Sidimpuan cenderung meningkat, terlihat dari 10 tahun terakhir (2011-2020) tidak memenuhi target yang artinya pendapatan dari Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sidimpuan terus mengalami penurunan.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan (i) pajak daerah, (ii) retribusi daerah, (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagian besar pendapatan asli daerah ini digolongkan dalam pungutan(retribusi), bahkan untuk kabupaten dan kota, pungutan hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah, dimana sumber penerimaan retribusi daerah terbesar adalah retribusi pasar, rumah sakit dan klinik, izin bangunan, dan terminal bus atau taksi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan sumber pendapatan asli daerah tersebut diatas yangmemberi masukan pada kas daerah Kota Padang Sidimpuan adalah retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Berikut data realisasi retribusi daerah Kota Padang Sidimpuan dari tahun 2011 sampai 2020.

Tabel 1.2 : Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Padang Sidimpuan 2011-2020 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2011	625,000,000	220,162,576
2012	625,000,000	329,573,423
2013	625,000,000	161,844,175
2014	625,000,000	167,218,550
2015	625,000,000	320,162,497
2016	625,723,460	429,573,944
2017	405,636,940	261,844,175
2018	405,636,940	189,028,550
2019	405,636,940	174,218,675
2020	466,323,940	198,209,750

Sumber : DISPENDA Kota Padang Sidimpuan

Berdasarkan dari tabel 2 di bawah di jelaskan bahwa realisasi retribusi daerah dari tahun 2010-2020, pada tahun 2011 sebesar Rp. 220,162.576, pada tahun 2012 sebesar Rp. 329,573,423, pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar Rp. 161,844,175, pada tahun 2014 naik sebesar Rp. 167,218,550, pada tahun 2015 sebesar Rp. 320,162,497, pada tahun 2016 sebesar Rp. 429,573,944, pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp.261,844,175, pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar Rp. 189,028,550, pada tahun 2019 sebesar Rp. 174,218,675, pada tahun 2020 naik sebesar Rp. 198,209,750 Dari data realisasi retribusi daerah yang ada selama sempuluh tahun terakhir, tak satu pun yang memenuhi target yang di tetapkan, yang menjelaskan bahwa dalam pos-pos atau sumber-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sumber pemasukan retribusi daerah Kota Padang Sidimpunan masih perlu untuk di kelola atau di kembangkan lagi guna untuk mendorong penambahan pemasukan bagi retribusi daerah Kota Padang Sidimpuan.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang ReribusiDaerah, Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar.Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya.Sebagai tindak lanjut yang di ambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya adalah melakukan program dengan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah utamanya dari sektor pajak dan retribusi daerah sebagai sumber yang potensial dalam rangka mencapai dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Oleh karna itu, pendapatan daerah sektor retribusi dikatakaan cukup potensial dan mempunyai perandalam meningkatkan pendapatan asli daerahkarna retribusi merupakan pembayaran langsung dari rakyat kepada pemerintah yang tercermin dari adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa Kota Padang Sidimpuan merupakan salah satu kotayang mampu menggali potensi daerahnya sendiri. Salah satu potensi yang dimiliki adalah pendapatan retribusi pasar.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya distribusi produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan demikian pasar dapat dikatakan penyedia langsung kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor bagi pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui retribusi yang dihasilkan akan dapat menambah pendapatan asli daerah. Keberadaan pasar yang didalamnya tertampung dinamika ekonomi masyarakat yang membutuhkan penanganan yang bijak dalam pengelolaannya, untuk itu pasar yang disatu pihak merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah perlu perlu diintensifkan pungutan retribusinya dengan potensi yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **"Analisa Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Sidimpuan".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah

1. Berapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Sidimpuan?
2. Bagaimana perkembangan kontribusi retribusi pasar di daerah Kota Padang Sidimpuan selama tahun 2015 sampai 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kota Padang Sidimpuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Untuk mengetahui perkembangan kontribusi retribusi pasar di daerah Kota Padang Sidimpuan

1.4 Mamfaat Penelitian

Mamfaat yang diperoleh dalam penelitian ini untuk:

1. Untuk menambah wawasan peneliti dalam kajian ilmu tentang retribusi pasar
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah atau instansi terkait kebijakan-kebijakan dalam meningkat Retribusi Pasar.
3. Bagi akademisi, sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian yang sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat isi dari masing-masing bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan sebagai pendahuluan yang dibab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistem penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memuat tenatang landasan-landasan teori Penelitian-penelitian terdahulu yang sangat berhubungan dengan penelitian serta pengembangan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, yang meliputi lokasi penelitian jenis dan sumber, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan antara lain yaitu analisis dari setiap variabel penelit terdiri dari analisis kinerja.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diambil satu kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ekonomi Klasik

Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi pada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (stationary state). Pemerintah tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan perekonomian.Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian.Sebagai akibat depresi ekonomi dunia tahun 1929-1932), pandangan Smith kemudian dikoreksi oleh John Maynard Keynes (1936) dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan perbelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan langsung.

2.1.2 Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah

Menurut Hirawan (1991 170-171) dalam melaksanakan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah juga sering kali mengalami tiga masalah utama yaitu :

a. Adanya ketergantungan yang sangat besar dari daerah (terutamadi daerah kota) pada pmerintah pusat karena keterbatasan kemampuan daerah dalam memelanjai tugas-tugas daerah.
b. Peranan dari bantuan dan sumbangan yang semakin besar dalam belanja daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Kekaburan mengenai tingkat pemerintah mana yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tuga-tugas pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal-hal diatas, Kamauddin (1992;42) mejelaskan bahwa dalam rangka kebijksanaan keuangan daerah maka peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pendapat daerah terus ditingkatkan dan disempurnakan penyempurnaan terhadap meliputi

a. Mobilisasi dana yang digali dari potensi daerah sendiri secara wajar dan tertib serta dengan tetap berwawasan kesatuan yang berlandaskan prinsip ekonomi daerah yang lebih nyaman dan brtanggung jawab.
b. Desentralisasi dalam perencanaan penyusunan program serta pengambilan keputusan dalam memilih proyek-proyek daerah dan pelaksanaan
c. Penyempurnaan pelaksanaan subsidi bantuan dan pinjaman yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah dan daerah setempat.
d. Peningkatan kemampuan organisasi pemeritah daerah khususnya dibidang keuangan daerah dan pendapatan daerah tetap diarahkan untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yang menyangkut personalia manajemen dan struktur organisasi.
e. Memperkuat system pemantauan daerah yang efektif sehingga dapat mengoptimasisasikan penggunaan sumber ekonomi dan dana yang terbatas untuk pembangunan. Demikian juga agar pemamfaatan hasil-hasil pembangunan dapat dioptimalkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut HAW Widjaja (2002.143) dalam putra (2010), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam APBD

Sedangkan menurut Ahmad Fauzi dan Iskandar (1982) dalam Hadryan Putra (2010), keuangan daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola, mulai merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Abdul Halim (2007.24), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai "Semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, juga segala satuan, baikberupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku'. Penerimaan di Indonesia dapat dibagi dalam empat kelompok, yakni :

I. Pendapatan Asli Daerah
II. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
III. Sumbangan atau bantuan emerintah pusat
IV. Pinjaman Daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengelompokan tersebut berlaku bagi daerah provinsi maupun untuk daerah kabupaten dan kota Arsyad,1992,164)

Menurut Peratran Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 pasal1 ayat 6 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerinth daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Untuk mencapai sasaran peningkatan dana keungan daerah, baik daerah Provinsi maupun daerah kota maka kebijakan dimuka perlu diluangkan kedalam bentuk program- program pembangunan. Penyusunan dalam program pembangunan dibidang dana dan keuangan daerah ini pada umumnya merupakan program terpadu dengan program sector lain, sehingga dlaksanakansatu sama lain secara serasi dan menunjang (Kamaluddin,1997.193)

Sedangkan Lains (1992.102) menggangap bahwa daerah dapat memperoleh sumber kekayaan, cukup melalui beberapa cara :

a. Daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah disetuhui oleh pemerintah pusat.
b. Ikut mengambil bagian dari pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut.
c. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Salah satu langkah yang penting dan segera dilakukan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada dasarnya terdiri dari unsur-unsur hasil penerimaan pajak daerah, Retribusi Daerah, bagian laba perusahaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daerah, penerimaan dinas-dinas daerah dan lain-lain daerah yang sah (Kamaluddin 1992.47)

2.1.3 Pendapatan Daerah

Pada dasarnya pendapatan dapat diartikan sebgai penambahan kekayaan akibat terjadinya suatu peristiwa pada suatu periode tertentu. menurut Niswoger, Fress dan Warren dalam bukunya prinsip-prinsip akutansi yang telah diterjemahkan oleh Ruswinarno dan Herman Wibowo (1995.56) menyebutkan bahwa pendapatan merupakan kenaikan kotor (gross) dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, Penyewaan harta, pinjaman uangan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.

Menurut Bastian dan Gtot Sepriyanto (2002 82-83) Pendapatan daerah merupakan arus masuk bruto manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari aktivitas atau kegiatan entitas pemerintah selama satu periode yang mengakibatkan2 penambahan ekuitas dan yang bukan berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan.

2.1.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dlam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sektor pendapatandaerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat diliht sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan menurut Indra Bastian (2002;83) Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berikut sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

1) Pajak Daerah
    a. Pajak Provinsi
    b. Pajak Kabupaten/Kota
2) Retribusi Daerah, terdiri dari
    a. Retribusi Jasa Umum
    b. Retribusi Jasa Usaha
    c. Retribusi Perijinan Tertentu
3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemamfaatanatau pendaya gunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jas giropendapatan unga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

2.1.5 Retribusi Daerah

Menurut Suparmoko (2002:55) pengertian retribusi secara umum adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara dimana dapat terlihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Lebih lanjut, retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahtraan masyarakat. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yng diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad yani (2002,55) "Daerah Provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber keungannya dengan menetapkan selain yang telah ditetapkan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat"

Dari definisi pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, oleh karena wajib retibusi memamfaatkan (secara langsung) fasilitas dari pemerintah. Adapun pengertian dari retribusi yang tercamtum dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadai atau badan Retribusi tidak bersifat paksaan, oleh karena hanya dibebankan kepada orang atau badan yang menerima pelayanan atau mendapatkan izin dari pemerintah. Dari sejumlah uang yang disetorkan kepada pemerintah ada kontraprestasi yang langsung diterima oleh mereka yang menyetorkan sejumlah uang tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.6 Jenis –jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Prakoso 2004. 93) dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu reteibusi jasa umum,retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

2.1.6.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan mamfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau bada Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Jenis retribusi jasa umum adalah :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan AkteCatatan Sipil
d. Retribusi Pemakaman dan penguburan Mayat
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
f. Retribusi pelayanan Pasar
g. Retribusi Pelayanan Kendaraan Bermotor
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.6.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan system komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta Objek retribusi jasa usaha adalah retribusi jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
c. Retribusi tempat pelelangan
d. Retribusi Terminal
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
f. Retribusi Tempat Penginapan/Villa
g. Retribusi Penyedotan Kakus
h. Retribusi Rumah Pemotngan Hewan
i. Retibusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
j. Tempat rekreasi dan olahraga
k. Retribusi Penyebrangan Diatas Air
l. Retribusi Pengolahan Limbah cair
m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.6.3 Retribusi perizinan tertentu

Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peraturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemamfatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian lingkungan. Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.1.6.4 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan sesuatu bangunan.Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam memenuhi syrat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

2.1.6.5 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu

2.1.6.6 Retribusi Lain Gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yng telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

2.1.6.7 Retribusi Izin Trayek

Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin Oleh Pemerintah Derah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Daerah Berdasarkan penjelaan mengenai jenis-jenis pasar diatas, maka retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa umum. Hal tersebut dikarenakan retribusi merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial dan pelayanan tersebut belum cukup disediakan pihak swasta.

2.1.7 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Mengenai pemungutan retribusi daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini mengiringi perubahan peraturan mengenai pemerintahan daerah dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dimana pada pasal 82 ayat (1) dinyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa penentuan teori dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.8 Defenisi Pendapatan

Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan danmempunyai penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan.Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, dan biasanya sebagai tolak ukur berhasilnya suatu organisasi atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran menjadi hak daerah.Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah.Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber sumber.pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.Pendapatan aslidaerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah.

2.1.9 Defenisi Pasar

Pengertian pasar secara konkret adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli.Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih di titik beratkan pada kegiatan jual belinya.Pasar dapat terbentuk kapan dan dimana saja.Syarat-syarat terbentuknya pasar harus memenuhi 4 komponen adalah adanya penjual, pembeli,ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan yang terakhir adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.Pasar merupakan suatu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mata rantai yang menghubungkan antara produsen dan konsumen.Ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara dunia usahadengan masyarakat konsumen.Pasar memainkan peranan yang sangat pentingdalam perekonomian modern, karena harga-harga terbentuk di pasar.

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa: "Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ ditetapkan olehpemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yaang berbentuk kios, los dan bentuk bangunan lainnya".

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsure pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bias menambah pendapatan daerah.

2.1.10 Retribusi Pasar

Retribusi Pasar atau Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang disempurnakan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan sarana/fasilitas pasar yang disediakan dan dimiliki olehpemerintah daerah.Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas/ sarana pasar.

2.1.11 Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian Terdahulu yang dapat dijadikan acuan pada penelitian ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rohandi.S (2017)	Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010-2014	Menunjukkan bahwa bahwa kontribusi retribusi pasarterhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 2,52 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,34 persen, pada tahun 2012 menurun menjadi sebesar 1,15 persen, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan secara perlahan sebesar 1,19 dan 1,34 persen. Secara umum dapat kita simpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Makassar selama tahun pengamatan yaitu dari tahun 2010-2014 cenderung mengalmi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

			penurunan, dan rata-rata kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah relatif kecil sebesar 1,51 persen.
2	Nur Anisa Megawati (2007)	Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo	Jumlah potensi retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 12.153.050.875,00 per tahun dengan rata-rata potensi retribusi per pasar sebesar Rp. 675.169.493,06 per tahun. Hal tersebut berbeda jauh jumlahnya dari penerimaan realisasi retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo yang mana setiap tahunnya rata-rata hanya sebesar Rp. 7.615.848.173,00. Selisih antara rata-rata penerimaan retribusi pasar dengan potensi retribusi pasar adalah sebesar Rp 4.537.202.701,25. Jumlah potensi retribusi togu sebesar Rp. 6.218.750,00 per hari dengan rata-rata sebesar Rp. 2.072.916,67 per hari, jumlah potensi retribusi kios sebesar Rp. 14.059.412,50 per hari dengan rata-rata sebesar Rp. 827.024,26 per hari, jumlah potensi retribusi los sebesar Rp. 12.196.440,00 per hari dengan rata-rata sebesar Rp. 677.580,00 per hari dan jumlah potensi retribusi pancaan Rp. 2.378.000,00 per hari dengan rata-rata sebesar Rp. 264.222,22 per hari.
3	Dani Nugroho Sutiyuno (2009)	Kontribusi Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001 sampai 2007)	Rata-rata kontribusi yang diberikan retribusi pasar terhadap pendpatan asli daerah selama tahun 2001 sampai 2007 adalah 6,11%. Kontribusi Retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah yng terbesar terjadi di tahun 2001 dengan kontribusi sebesar 9,41% dan Kontribusi yang terkecil di tahun 2007 sebesar 4,57%. Dengan demikian retribusi yang di pungut oleh pemerintah kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

			Yogyakarta mempunyai kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.
4	Muhammad Yusuf Harahap (2019)	Implementasi Kebijakan Retribusi pasar di Kota Padang Sidempuan	Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan retribusi Pasar di Kota Padangsidimpuan telah dilakukan sejak tahun 2009 yang diserahkan kepada pihak pengelola swasta yaitu PT Anugerah Trade Centre. Akan tetapi dalam pengelolaan oleh PT Anugerah Trade Center penerimaan dari retribusi pasar di Kota Padang Sidempuan tidak pernah mencpai target dan jauh dibawah target penerimaan retribusi.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan Perumusan Masalah maka penulis mengemukakan hipotesis dalam perumusan masalah diatas adalah

1. Diduga konribusi retribusi pasar cukup besar terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang Sidimpuan.
2. Diduga perkembangan kontribusi retribusi pasar di Kota Padang Sidimpuan meningkat selama tahun 2011 sampai 2020.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang di gunakan untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Padang Sidimpuan adalah jenis penelitian kuantitatif.Menurut Sugiyuno (2013: 13) Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Lokasi Peneltian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang Sidimpuan dengan pertimbangan bahwa Kota Padang Sidimpuan adalah salah satu daerah yang cukup potensial dalam mengembangkan penerimaan daerah dari sektor retribusi, khususnya retribusi pasar.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder atau data pendukung yang diperoleh dengan cara memanfaatkan data atau arsip-arsipdari instansi yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Padang Sidimpuan, dan PD. Pasar Padang Sidimpuan, KotaPadang Sidimpuan selaku pengelola retribusi pasar. Data sekunder adalah pengumpulan data dengan mempelajari masalah yangberhubungan dengan objek yang diteliti.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam peneitian ini mengunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan caramengambil data dari dokumen-dokumen, atau bukti tertulis berupa laporan data,khususnya data mengenai Retribusi Pasar, Retribusi Daerah dan PAD sempuluh tahun terakhir. Perlu ditegaskan bahwa data yang dimaksud merupakan data yang bersifat nasional yang diambil dari dinas yang terkait, yaitu:DISPENDA Kota Padang Sidimpuan, dan PD>. Pasar Padang Sidimpuan Kota Padang Sidimpuan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisi Data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermamfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan peneliti. Dalam hal ini peneliti akan membahas dua analisis yang digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah diatas yaitu :

3.5.1 Anlisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Sidimpuan, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{Realisasi\ Retribusi\ Pasar}{Realisasi\ PAD} \text{ x } 100\%$$

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.5.2 Analisis *Least Square*

Analisis yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kontribusi retribusi pasar di daerah Kota Padang Sidempuan dengan menggunakan rumus *trend linier* yaitu dengan menggunakan metode *least square* dengan rumusan sebagai berikut:

$Y^1 = \alpha + bX$

Dimana:

Y^1 : perkembangan kontribusi retribusi pasar di Kota Padang Sidempuan

X : periode waktu

b : koefisien regresi

Adapun kaidah pengambilan keputusan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai b menunjukkan angka positif maka trend meningkat
2. Jika nilai b menunjukkan angka negatif maka trend menurun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Letak dan Geografis Kota Padang Sidempuan

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Padang Sidempuan

Adapun secara teknis, letak geografis Kota Padang Sidempuan adalah sebagai berikut:

1. Secara astronomis, Kota Padangsidimpuan terletak antara 01018’07’’-01028’19’’ Lintang Utara dan antara 99018’53’’ - 99020’35’’ Bujur Timur.
2. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Padangsidimpuan memiliki batas-batas:

   Utara – Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat);

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selatan - Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola);

Barat - Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Selatan);

Timur – Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur)

3. Kota Padagsidimpuan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu:
    a. Padangsidimpuan Tenggara
    b. Padangsidimpuan Selatan
    c. Padangsidimpuan Batunadua
    d. Padangsidimpuan Utara
    e. Padangsidimpuan Hutaimbaru
    f. Padangsidimpuan Angkola Julu

Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan 159,28 km2 yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, luas wilayah terbesar di Kecamatan Batunadua dengan 41,81 km2 atau sekitar 26,25 persen dari luas total Padangsidimpuan, diikuti oleh Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas 37,70 km2 atau sekitar 23,67 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dengan luas 22,97 km2 atau sekitar 14,38 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dengan luas 22,64 km2 atau sekitar 14,21 persen.

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan memiliki luas 19,26 km2 atau sekitar 12,09 persen, sedangkan Padangsidimpuan Utara mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 14,97 km2 atau sekitar 9,04 persen. Kota Padangsidimpuan terletak dekat garis khatulistiwa sehingga daerah ini beriklim tropis. Pada Tahun 2020, curah hujan Kota Padangsidimpuan masuk kriteria menengah dengan hari hujan paling banyak ada di Bulan Oktober sebanyak 23 hari hujan. Berikut ini akan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dijabarkan luas daerah dan jumlah pulau menurut Kecamatan di Kota Padang Sidempuan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Padang Sidempuan Tahun 2020

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km^2)
1.	Padangsidempuan Tenggara	Pijor Koling	37.70
2.	Padangsidempuan Selatan	Ujung Pandang	19,26
3.	Padangsidempuan Batunadua	Batunadua	41,81
4.	Padangsidempuan Utara	Wek li	14,97
5.	Padangsidempuan Hutaimbaru	Hutaimbaru	22,64
6.	Padangsidempuan Angkola Julu	Joring Natobang	22,90
Luas Kota Padang Sidempuan			159,28

4.1.2 Keadaan Penduduk Kota Padang Sidempuan

Gambar 4.2 Grafik Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Bekerja

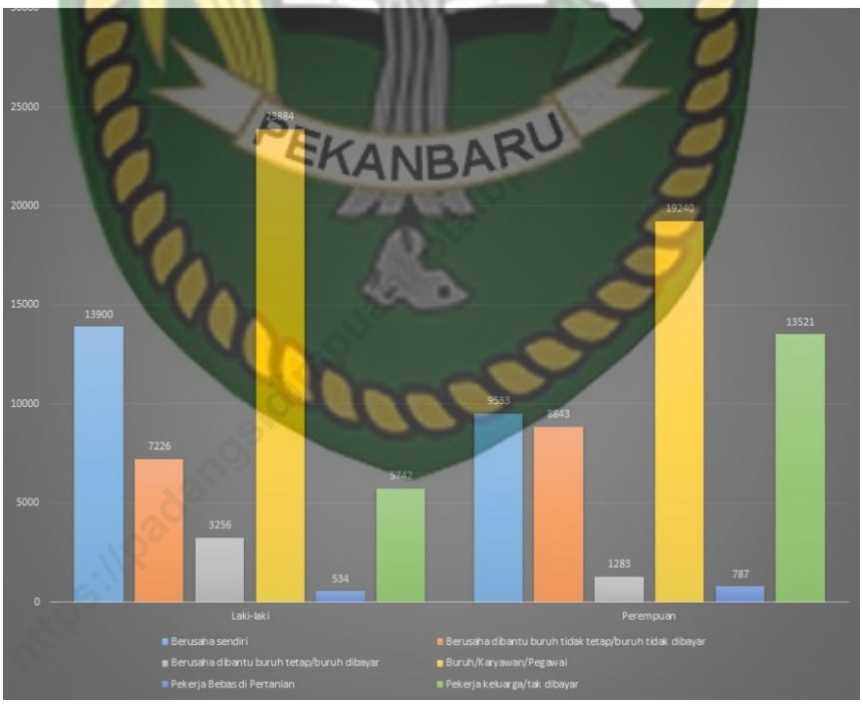

Jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 225.105 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 159,28 km2 maka kepadatan penduduknya mencapai 1.413 jiwa/km2. Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya yang mencapai 4.401 jiwa/km2 disusul oleh Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang mencapai 3.588 jiwa/km2. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu sebesar 99,03 persen. Hal tersebut berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki sekitar 0,49 persen. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuan pada Tahun 2020 sebesar 252 pekerja.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020 (%)	Persentase Penduduk (%)
1	Padangsidempuan Tenggara	34.043	1,29	15,12
2	Padangsidempuan Selatan	69.105	1,20	30,70
3	Padangsidempuan Batunadua	27.886	4,11	12,39
4	Padangsidempuan Utara	65.885	1,03	29,27
5	Padangsidempuan Hutaimbaru	18.835	1,92	8,37
6	Padangsidempuan Angkola Julu	9.351	2,15	4,15
Jumlah		225.105	1,58	100

Peningkatan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Di tingkat pendidikan dasar, jumlah sekolah pada tahun ajaran 2020/2021 ada sebanyak 95 buah dengan jumlah guru 1.524 orang dan murid sebanyak 23.661 orang. Sementara jumlah sekolah menengah pertama (SMP) ada sebanyak 26 sekolah dengan jumlah guru 750 orang dan jumlah murid ada sebanyak 9.831

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang. Jumlah sekolah tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ada sebanyak 19 sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing 610 orang dan 7.714 orang.

Sedangkan jumlah sekolah, guru dan murid pada Sekolah menengah Kejuruan (SMK) masing- masing sebanyak 17 sekolah, 527 orang dan 7.145 orang. Pada tahun yang sama jumlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dikelola oleh Kementerian Agama di Kota Padangsidimpuan ada sebanyak 10 sekolah dengan jumlah murid 2.967 dan jumlah guru sebanyak 153 guru. Tsanawiyah (MTs) ada sebanyak 18 sekolah dengan jumlah guru 471 orang dan jumlah murid sebanyak 5.362 orang. Pada tingkat Madrasah Aliyah (MA) jumlah sekolah ada sebanyak 12 sekolah dengan jumlah guru 274 orang dan jumlah murid sebanyak 2.863 orang.

Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit merupakan faktor utama dalam menunjang perbaikan kualitas hidup. Jumlah rumah sakit yang ada di Kota Padangsidimpuan tahun 2020 terdiri dari 4 rumah sakit umum, 10 puskesmas, 29 puskesmas pembantu, 20 Poskesdes, 212 Posyandu, 32 Apotek dan 19 toko obat. Jumlah tenaga medis di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut, jumlah dokter umum ada sebanyak 88 orang, dokter gigi sebanyak 15 orang, dokter spesialis sebanyak 61 orang, bidan sebanyak 631 orang, serta perawat sebanyak 327 orang.

Banyaknya pernikahan dan perceraian, khususnya untuk umat yang beragama Islam pada tahun 2020 masing-masing mencapai 1.446 pasangan menikah dan 295 pasangan bercerai. Sarana ibadah umat beragama tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ada sebanyak 215 masjid, 113 langgar/mushola, 58 gereja protestan, 2 gereja katolik, serta 1 wihara.

4.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang Sidempuan

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi.

Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil "akhir" dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)1. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side)* dan sisi permintaan (*demand side)* barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical descrepancy*) tersebut.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat terntang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (*SNA*) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010.

Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar 4.3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran Tanpa Impor

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2100 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (*SNA*) yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Secara total, PDRB Kota Padangsidimpuan atas dasar harga Konstan 2010, pada periode 2016- 2020 meningkat sebesar 16,3%, yakni dari 3.636,87 miliar Rupiah menjadi 4.230,41 miliar Rupiah. Jika dinilai atas dasar harga berlaku, maka peningkatan ini jauh lebih besar, yakni 32,13%, yakni dari 4.903,28 miliar Rupiah menjadi 6.478,66 miliar Rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Padangsidimpuan pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Padang Sidempuan 2016-2020

Komponen Pengeluaran (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019*) (5)	2020**) (6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	3 170,54	3 432,45	3 706,38	3 942,12	4 048,49
2 Konsumsi LNPRT	157,63	174,72	202,06	223,19	221,96
3 Konsumsi Pemerintah	1 083,42	1 212,09	1 205,13	1 247,34	1 246,84
4 PMTB	1 979,83	2 091,88	2 196,28	2 333,10	2 343,55
5 Perubahan Inventori	56,22	53,08	64,36	69,38	79,30
6 Ekspor	1 364,68	1 496,04	1 639,00	1 591,40	1 526,57
7 Impor	2 909,04	3 087,99	3 154,36	3 033,40	2 988,06
Total PDRB	**4 903,28**	**5 372,28**	**5 858,84**	**6 373,13**	**6 478,66**

r) Angka Revisi
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Padangsidimpuan pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Padang Sidempuan 2016-2020

Komponen Pengeluaran (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019*) (5)	2020**) (6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	2 248,58	2 339,72	2 452,08	2 549,46	2 542,46
2 Konsumsi LNPRT	113,98	121,63	133,21	146,42	144,40
3 Konsumsi Pemerintah	759,95	805,84	824,60	830,24	829,63
4 PMTB	1 415,36	1 447,91	1 507,58	1 590,08	1 582,51
5 Perubahan Inventori	52,70	51,50	57,63	60,97	66,77
6 Ekspor	1 109,59	1 178,24	1 241,84	1 289,03	1 206,28
7 Impor	2 063,28	2 114,51	2 178,00	2 204,88	2 141,63
Total PDRB	**3 636,87**	**3 830,32**	**4 038,93**	**4 261,32**	**4 230,41**

r) Angka Revisi
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kota Padangsidimpuan meningkat, yakni sebesar 3.636,87 Miliar Rupiah (2016); 3.830,32 Miliar Rupiah (2017); 4.038,93 Miliar Rupiah (2018); 4.261,32 Miliar Rupiah (2019) dan 4.230,41 Miliar Rupiah (2020);. Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Padangsidimpuan mengalami perlambatan pada periode 2016 - 2020, yakni dari 5,29 persen pada tahun 2016 menjadi -0,73 persen pada tahun 2020.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Padangsidimpuan, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 4.5 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Padang Sidempuan 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
- ADHB	4 903,28	5 372,28	5 858,84	6 373,13	6 478,66
- ADHK 2010	3 636,87	3 830,32	4 038,93	4 261,32	4 230,41
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	23 029	24 870	26 766	28 730	28 781
- ADHK 2010	17 081,17	17 731,90	18 451,72	19 210,09	18 793,07
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHB	9,20	7,99	7,62	7,34	0,18
Jumlah Penduduk (org)	212 917	216 013	218 892	221 827	225 105

r) Angka Revisi
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Walaupun secara nilai pendapatan perkapita masyarakat Kota Padangsidimpuan mengalami peningkatan. Namun pertumbuhannya berbanding terbalik yang terus menggerus sejak tahun 2016 (9,20 persen) sampai tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(0,18 persen). Secara nilai icor (6,78 tahun 2019), untuk berinvestasi di daerah Kota Padangsidimpuan membutuhkan sekitar 7 tahun dalam menghasilkan profit. Ini dikarenakan pada komponen PMTB lebih besar pada subkomponen Bangunan. Dimana dari angka ini menunjukkan bahwa setiap berinvestasi dalam kategori bangunan akan menjadi profit setelah tujuh tahun. Namun untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang berapa lama dibutuhkan untuk mendapatakan profit. Perlu dilakukan analisis lebih mendalam dengan sumber data yang lebih beragam.

PDRB Kota Padangsidimpuan atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2020 mencapai 6,48 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 4,23 triliun rupiah. Selama lima tahun terakhir nilai PDRB ADHB Kota Padangsidimpuan menunjukkan peningkatan. Namun berbeda dengan pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang mengalami Kontraksi pada tahun 2020. Dimana tahun 2019 masih mencapai 5,51 persen tergerus menjadi -0,73 pada tahun 2020. Searah dengan PDRB ADHB Kota Padangsidimpuan yang juga mengalami penurunan dari 8,78 persen Tahun 2019 menjadi 1,66 persen pada 2020.

Tabel 4.6 PDRB Padangsidempuan Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
(1)	(2)	(3)
2016	4 903,28	3 636,87
2017	5 372,28	3 830,32
2018	5 858,84	4 038,93
2019*	6 373,13	4 261,32
2020**	6 478,66	4 230,41

** Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, maka PDRB ADHB Kota Padangsidimpuan menduduki peringkat ke-24 atau hanya 0,79
persen terhadap total PDRB Provinsi Sumatera Utara. Untuk peringkat pertama adalah Kota Medan mencapai 28,79 persen dan untuk peringkat terakhir merupakan
Kabupaten Pakpak Bharat yang hanya berperan sebesar 0,16 persen terhadap PDRB
Peranannya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2020.

Potensi ekonomi Kota Padangsidimpuan dapat dilihat dari struktur perekonomian yang didasari pada PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2020 lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
masih tetap menjadi lapangan usaha yang paling dominan dan terus meningkat peranannya dari tahun ke tahun yaitu dari 21,74 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 22,86 persen pada tahun 2020 yang secara rinci disumbangkan oleh sub lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 1,86 persen, dan sub lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor 21,00 persen.

Salah satu misi pemerintahan Kota Padangsidimpuan adalah meningkatkan daya saing daerah yang kuat dengan melakukan strategi peningkatan pengembangan Kota Padangsidimpuan sebagai pusat industri jasa serta pusat perdagangan di regional Tapanuli Bagian Selatan. Peningkatan peranan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hasil arah kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan yaitu dengan peningkatan pusat perdagangan dan jasa, perbaikan sarana dan prasarana perdagangan, dan meningkatkan fasilitas pengembangan usaha bagi pedagang.

Lapangan usaha konstruksi serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tetap menduduki posisi kedua dan ketiga pada distribusi PDRB Kota Padangsidimpuan meskipun peranannya semakin menurun dari tahun ke tahun. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan meskipun memiliki peranan yang cukup penting dalam struktur perekonomian kota Padangsidimpuan, namun produktifitas tenaga kerjanya rendah dan juga didominasi oleh tenaga kerja tidak dibayar (pekerja keluarga), sehingga pertumbuhan yang terjadi pada lapangan usaha ini belum mampu memberikan manfaat banyak terhadap kesejahteraan masyarakat (petani). Oleh sebab itu, perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap daya saing dan produktifitas di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sangat dibutuhkan.

Lapangan usaha konstruksi dalam bentuk pembangunan infrastruktur memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Lapangan usaha kontruksi merupakan sektor yang padat modal dan menyerap lapangan kerja yang banyak. Akan tetapi perkembangan lapangan usaha konstruksi berimplikasi terhadap keterbatasan lahan pertanian. Diperlukan kebijakan pemerintah agar perkembangan konstruksi tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan dan inovasi agar pengembangan konstruksi dapat memanfaatkan lahan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam analisis pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Mengingat pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada akhirnya akan menghasilkan balas jasa

terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi akan meningkat.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan mengalami perubahan pola pertumbuhan yang hampir sama dengan Sumatera Utara yaitu mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2016 sampai pada tahun 2019 dan terjadi kontraksi pada tahun 2020. Posisi pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan ditahun 2016-2020 berada diatas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Untuk tahun 2016 Provinsi Sumatera Utara hanya mencapai 5,18 persen sedangkan Kota Padangsidimpuan mampu tumbuh pada 5,29 persen. Walupun pada tahun 2020 mengalami penurunan, dimana Kota padangsidimpuan berada pada -0,73 persen. Tetapi Provinsi Sumatera Utara juga mengalami penurunan menjadi -1,07 persen. Ini menjukkan bahwah geliat perekonomian masih lebih baik di Kota Padangsidimpuan secara umum dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Hampir Sebagian Besar lapangan usaha mencatat pertumbuhan negatif, meskipun demikian dari 17 kategori lapangan usaha terdapat dua kategori lapangan

usaha yang mengalami percepatan. Lapangan usaha informasi dan komunikasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 9,55 persen dan sekaligus lapangan usaha yang mengalami percepatan pada tahun 2020.

Adapun lapangan usaha yang masih tumbuh positif berturut-turut, di antaranya pengadaan listrik dan gas 7,27 persen; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 2,40 persen; jasa pendidikan 1,81 persen; real estate 1,68 persen; jasa keuangan dan asuransi 1,74 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan 1,15 persen; industri pengolahan 1,02 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib -0,07 persen; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor -0,12 persen; pertambangan dan penggalian -0,80 persen; jasa lainnya -1,36 persen; jasa kesehatan dan kegiatan sosial -2,72 persen; jasa perusahaan -3,76 persen; penyediaan akomodasi dan makan minum -4,36 persen; transportasi dan pergudangan -5,75 persen; dan konstruksi -6,20 persen.

PDRB per kapita Padangsidimpuan atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar 23,03 juta rupiah dan meningkat menjadi 28,79 juta rupiah pada tahun 2020. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2016-2019 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Namun pada tahun 2020, PDRB per kapita Padangsidimpuan atas dasar harga konstan mengalami penurunan dari 19,21 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 18,80 juta rupiah tahun 2020.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tahun 2020, nilai pertumbuhan ekonomi Padangsidimpuan yang bernilai -0,73 persen yang mana -0,03 persen diciptakan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, diikuti oleh lapangan usaha

konstruksi sebesar -0,77 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 0,20 persen, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar -0,39 persen, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib -0,01 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -0,29 persen, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,13 persen, dan lapangan usaha lainnya sebesar 0,43 persen yaitu gabungan dari semua lapangan usaha selain lapangan usaha yang telah disebutkan.

4.2 Perkembangan Retribusi Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Sidempuan

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontibusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan

cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masingmasing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi

kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh *stakeholder*, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang *pro*rakyat.

Sumber penerimaan daerah mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan

sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumbersumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumbersumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya uang mengikuti fungsi.

Seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah serta seluruh jenis pembiayaan (pengeluaran) daerah yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan, secara jelas tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh masing-masing daerah. Berikut ini akan dijabarkan mengenai perkembangan retribusi pasar dan pendapatan asli daerah di Kota Padang Sidempuan periode 2014-2019 sebagai berikut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4.2.1 Perkembangan Retribusi Pasar di Kota Padang Sidempuan

Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut perimbangan social ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu. Adapun perkembangan retribusi pasar yang didapatkan berdasarkan data time series dari dinas pendapatan asli daerah yang dimulai pada tahun 2011-2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6

Perkembangan Retribusi Pasar di Kota Padang Sidempuan Tahun 2011-2020

No	Tahun	Retribusi Pasar (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Persentase (%)
1	2011	220,162,576		
2	2012	329,573,423	109,410,847	49.69
3	2013	161,844,175	-167,729,248	-50.89
4	2014	167,218,550	5,374,375	3.32
5	2015	320,162,497	152,943,947	91.46
6	2016	429,573,944	109,411,447	34.17
7	2017	261,844,175	-167,729,769	-39.04
8	2018	189,028,550	-72,815,625	-27.80
9	2019	174,218,675	-14,809,875	-7.83
10	2020	198,209,750	23,991,075	13.77

Sumber: BPKD Kota Padang Sidempuan

Dari tabel 4.6 di atas, dapat dijelaskan perkembangan retirubsi pasar di Kota Padang Sidempuan tahun 2011 sampai 2020, dimana pertumbuhan retribusi pasar yang terbesar yaitu pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar Rp 152.943.947 atau bertambah sebesar 91,46%. Sedangkan pertumbuhan retribusi pasar di Kota Padang Sidempuan yang terkecil yaitu pada tahun 2019 dengan penurunan sebesar Rp 14.809.875 atau minus sebesar 7,83%. Tetapi pada tahun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2020 terjadi peningkatan retribusi pasar di Kota Padang Sidempuan sebesar Rp 23.991.075 atau bertambah sebesar 13,77%.

4.2.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Sidempuan

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2014 – 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Sidempuan

Tahun 2011-2020

No	Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Persentase (%)
1	2011	40.291.003.229		
2	2012	50.211.235.389	9,920,232,160	24.62
3	2013	69.272.483.593	19,061,248,204	37.96
4	2014	49.392.093.500	-19,880,390,093	-28.69
5	2015	58.725.449.619	9,333,356,119	18.89
6	2016	67.730.738.637	9,005,289,018	15.33
7	2017	78.147.944.283	10,417,205,646	15.38
8	2018	109.640.419.280	31,492,474,997	40.29
9	2019	75.063.575.092	-34,576,844,188	-31.53
10	2020	87.432.283.185	12,368,708,093	16.47

Sumber: BPKD Kota Padang Sidempuan

Dari tabel 4.7 di atas, dapat dijelaskan perkembangan pendapatan asli daerah di Kota Padang Sidempuan tahun 2011 sampai 2020, dimana pertumbuhan pendapatan asli daerah yang terbesar yaitu pada tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar Rp 31.492.474.997 atau bertambah sebesar 40.29%. Sedangkan pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kota Padang Sidempuan yang terkecil yaitu pada tahun 2019 dengan penurunan sebesar Rp 34.576.844.188 atau minus sebesar 31.53%. Tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan pendapatan asli

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daerah di Kota Padang Sidempuan sebesar Rp 12.368.708.093 atau bertambah sebesar 16.47%.

4.3 Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Sidempuan

Setelah mendeskripsikan nilai pendapatan asli daerah dan retribusi pasar Kota Padang Sidempuan dengan periode tahun 2011-2020, selanjutnya dilakukan analisis kontribusi untuk menjawab tujuan penelitian ini. Analisis kontribusi ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi pasar dalam mendukung pendapatan asli daerah.

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Sidimpuan, dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi di setiap objek pasar terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang Sidimpuan. Kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{Realisasi\ Retribusi\ Pasar}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

Adapun perhitungan kontribusi retribusi pasar adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi penerimaan retribusi pasar tahun 2011

   $= \frac{220.162.576}{40.291.003.229} \times 100\%$

   = 5,46%

   Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2011 adalah sebesar 5,46%. Artinya, realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2011 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 5,46% dari total realisasi penerimaan PAD.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kontribusi penerimaan retribusi pasar tahun 2012

   $= \frac{329.573.423}{50.211.235.389}$ x 100%

   = 6,56%

   Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2012 adalah sebesar 6,56%. Artinya, realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2012 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 6,56% dari total realisasi penerimaan PAD.

3. Kontribusi penerimaan retribusi pasar tahun 2013

   $= \frac{161.844.175}{69.272.483.593}$ x 100%

   = 2,33%

   Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2013 adalah sebesar 2,33%. Artinya, realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2013 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 2,33% dari total realisasi penerimaan PAD.

4. Kontribusi penerimaan retribusi pasar tahun 2014

   $= \frac{167.218.550}{49.392.093.500}$ x 100%

   = 3,38%

   Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2014 adalah sebesar 3,38%. Artinya, realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2014 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 3,38% dari total realisasi penerimaan PAD.

5. Kontribusi penerimaan retribusi pasar tahun 2015

   $= \frac{320.162.497}{58.725.449.619}$ x 100%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

= 5,45%

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2015 adalah sebesar 5,45%. Artinya, realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2015 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 5,45% dari total realisasi penerimaan PAD.

6. Kontribusi penerimaan retribusi pasar tahun 2016

$= \frac{429.573.944}{67.730.738.637}$ x 100%

= 6,34%

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2016 adalah sebesar 6,34%. Artinya, realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2016 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 6,34% dari total realisasi penerimaan PAD.

7. Kontribusi penerimaan retribusi pasar tahun 2017

$= \frac{261.844.175}{78.147.944.283}$ x 100%

= 3,35%

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2017 adalah sebesar 3,35%. Artinya, realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2017 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 3,35% dari total realisasi penerimaan PAD.

8. Kontribusi penerimaan retribusi pasar tahun 2018

$= \frac{189.028.550}{109.640.419.280}$ x 100%

= 1,72%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2018 adalah sebesar 1,72%. Artinya, realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2018 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 1.72% dari total realisasi penerimaan PAD.

9. Kontribusi penerimaan retribusi pasar tahun 2019

$= \frac{174.218.675}{75.063.575.092}$ x 100%

= 2,32%

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2019 adalah sebesar 2,32%. Artinya, realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2019 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 2,32% dari total realisasi penerimaan PAD.

10. Kontribusi penerimaan retribusi pasar tahun 2020

$= \frac{198.209.750}{87.432.283.185}$ x 100%

= 2,26%

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2020 adalah sebesar 2,26%. Artinya, realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2020 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 2,26% dari total realisasi penerimaan PAD.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui mengenai penerimaan kontribusi retribusi pasar di atas dirangkum kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8

Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Tahun 2014-2019

No	Tahun	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi PAD (RP)	Kontribusi (%)
1	2011	220,162,576	40,291,003,229	5.46
2	2012	329,573,423	50,211,235,389	6.56
3	2013	161,844,175	69,272,483,593	2.33
4	2014	167,218,550	49,392,093,500	3.38
5	2015	320,162,497	58,725,449,619	5.45
6	2016	429,573,944	67,730,738,637	6.34
7	2017	261,844,175	78,147,944,283	3.35
8	2018	189,028,550	109,640,419,280	1.72
9	2019	174,218,675	75,063,575,092	2.32
10	2020	198,209,750	87,432,283,185	2.26
Rata-rata				3,92

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui mengenai kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daeah Kota Padang Sidempuan tahun 2011-2020 dengan rentang rata-rata 3,92%. Pada tahun 2015 diketahui retribusi pasar berkontribusi sebesar 5,45% dimana kemudian tahun berikutnya yaitu 2016 mengalami peningkatan kontribusi menjadi 6,34%. Namun, di tahun berikutnya terhitung pada tahun 2017 hingga 2020 jumlah kontribusi retribusi pasar menurun dari dua tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena penurunan target retribusi pasar diikuti dengan penurunan realisasi pendapatan asli daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4.4 Perkembangan Kontribusi Retribusi Pasar di Kota Padang Sidempuan Tahun 2011 Sampai 2020

Selanjutnya akan dibahas mengenai perkembangan kontribusi retribusi pasar di Kota Padang Sidempuan Tahun 2011-2020 dengan menggunakan analisis trend (metode kuadrat terkecil). Bentuk persamaan garis trend atau garis regresi adalah sebagai berikut:

Y' = α+ bX

Rumus penyelesaiannya sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{\sum y}{n}$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

dengan catatan:

1. Jika α = positif; maka trendnya meningkat
2. Jika b = negatif; maka trendnya menurun

Berdasarkan rumus yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disusun perhitungan trend dari kontribusi retribusi pasar di Kota Padang Sidempuan periode tahun 2011 sampai dengan 2020 pada tabel berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 4.9

Perhitungan Trend dari Kontribusi Retribusi Pasar di Kota Padang Sidempuan

Tahun 2011 - 2020

Tahun	Y Kontribusi Retribusi Pasar (X%)	X	X2	XY
2011	5.46	-9	81	-49.14
2012	6.56	-7	49	-45.92
2013	2.33	-5	25	-11.65
2014	3.38	-3	9	-10.14
2015	5.45	-1	1	-5.45
2016	6.34	1	1	6.34
2017	3.35	3	9	10.05
2018	1.72	5	25	8.6
2019	2.32	7	49	16.24
2020	2.26	9	81	20.34
Total	39.17	0	330	-60.73

$\alpha = \frac{\sum y}{n}$

$= \frac{39,17}{10}$

= 3,91

$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$

$= \frac{-60,73}{330}$

= -0,18

Maka didapat persamaan trend sebagai berikut:

Y' = 3,91 + (-0,18) X

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari persamaan trend Y' = 3,91 + (-0,18) X, Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di kota Padang Sidempuan pada tahun 2011 sampai 2020 menurun, yang dimana kontribusi retribusi pasar sebesar 3,91% dan perubahaan kontribusi retribusi pasar mengalami penurunan per tahun secara berkala sebesar -0,18%.

Adapun alasan terjadinya penurunan terhadap Trend (Perkembangan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Sidempuan selama tahun 2011 sampai 2020) ini dikarenakan :

1. Kurangnya kesadaran atau kepekaan para pedagang dalam membayar wajib retribusi pasar, dikarenakan banyaknya pedagang yang mengeluhkan kondisi pasar yang kurang nyaman untuk berjualan.
2. Kurangnya informasi yang disampaikan oleh pemungut retribusi pasar sehingga para pedagang beranggapan bahwa tarif retribusi sama untuk setiap jenis tempat dagang, ada juga pedagang yang membayar tariff retribusi hanya pada satu tempat dagang saja padahal memiliki lebih dari satu tempat dagang.
3. Kemudian, adanya kecurangan pemungutan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, belum lagi dengan berkurangnya frekuensi pemungutan dari pihak Dinas yang turun langsung ke los atau toko maupun kios untuk memungut retribusi pasar.
4. Di era modern seperti saat ini pasar tradisional sudah mulai tersingkirkan karena banyaknya bermunculan supermarket, mini market atau pasar medorn lainnya. Dengan begitu pasar tradisonal perlahan mulai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersingkirkan, maka dari itu para pedagang susah untuk membayar retribusi karena pendapatan mereka berkurang

Hal ini merupakan hasil penelitian dari (Muhammd Yusuf Harahap,2019) dan juga sesuai dengan penelitian yang dimana realisasi retribusi pasar di kota padang sidempuan selama tahun 2011-2020 lebih kecil dari target.

Dari faktor yang diuraikan diatas maka realisasi retribusi pasar di kota Padang Sidempuan selama tahun 2011-2020 lebih rendah dari pada target, Sehingga Trend (Perkembangan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Sidempuan selama tahun 2011-2020) menurun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi retribusi pasar dan realiasi pendapatan asli daerah Kota Padang Sidempuan periode tahun 2011-2020, dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan, dan rata-rata kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah relatif kecil yaitu sebesar 3,92%.

Trend (Perkembangan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di kota Padang Sidempuan selama tahun 2011-2020) menurun, Hal ini disebabkan karena Kurangnya kesadaran atau kepekaan para pedagang dalam membayar wajib retribusi pasar, dikarenakan banyaknya pedagang yang mengeluhkan kondisi pasar yang kurang nyaman untuk berjualan.

Kurangnya informasi yang disampaikan oleh pemungut retribusi pasar sehingga para pedagang beranggapan bahwa tarif retribusi sama untuk setiap jenis tempat dagang, ada juga pedagang yang membayar tariff retribusi hanya pada satu tempat dagang saja padahal memiliki lebih dari satu tempat dagang.

Kemudian, adanya kecurangan pemungutan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, belum lagi dengan berkurangnya frekuensi pemungutan dari pihak Dinas yang turun langsung ke los atau toko maupun kios untuk memungut retribusi pasar.

Di era modern seperti saat ini pasar tradisional sudah mulai tersingkirkan karena banyaknya bermunculan supermarket, mini market atau pasar medorn lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan begitu pasar tradisonal perlahan mulai tersingkirkan, maka dari itu para pedagang susah untuk membayar retribusi karena pendapatan mereka berkurang. Dari faktor diatas maka realisasi retribusi pasar di Kota Padang Sidempuan selama tahun 2011-2020 lebih rendah dari target yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan semua jajaran yang terkait

   Diharapkan kepada pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempuan agar bisa meningkatkan pengawasan pelaksanaan retribusi pasar, meningkatkan sumber daya manusia pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan mengadakan penyuluhan. Kemudian, perlu melakukan perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu, mengingat retribusi pasar bisa dapat berkembang seiring perkembangan perekonomian.

2. Bagi akademisi

   Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bahwa penelitian ini mampu dijadikan bahan referensi yang bermanfaat selain dapat dikembangkan dengan faktor-faktor lain seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan dan lain sebagainya, sehingga dapat dilakukan perbandingan konntribusi mana yang mendominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Sidempuan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Adam Smith, *Teori Ekonomi Klasik,* id.m.wikipedia.org

Ahmad Fauzi dan Iskandar, *Keuangan Daerah,* Hadryan Putra,2010

Anonimous, www.google.com "*DefenisiPasar*" 28 Oktober 2020

Anonimous, www.google.com "*Retribusi Daerah",*28Oktober 2020

Anonimous, www.google.com "*DefnisiPendapatan"* 28 Oktober 2020

DISPENDA Kota Padang Sidimpun, *Data Target dan Realisasi RetribusiDaerah Kota Padang Sidimpuan 2015-2019*

Dinas Pasar Kota Padang Sidimpuan, *Data danTarget Realisasi Retribusi Pasar Kota Padang SidimpuanTahun 2015-2019*

DaniNugrohoSutiyuno , *Kontribusi Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001 sampai 2007* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta,2009

Hirawa n, Keuangan Daerah, *Pemrintah Daerah danKeuangan Daerah.*CV.Intermedia, Jakarta,1991,170-171

Kamaluddin, *Kebijaksanaan Keuangan Daerah,* Graha Ilmu,2014

NurAnisa Megawati , *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo,* Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Sidoarjo.,2007

Peraturan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pasar

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif,* Bandung: Alfabeta,2017

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rohandi S , *Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010-2014* Skripi Fakutas Ekonomi Universitas Makassar,2007

Muhammad Yusuf Harahap , *Implementasi Kebijakan Retribusi pasar di Kota Padang Sidempuan* Jurnal Fakultas Ekonomi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Padang Sidempuan,2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :